

**PELUANG DAN TANTANGAN FORUM PAKISTAN INDIA PEOPLES FORUM
FOR PEACE AND DEMOCRACY (PIFPD) TERHADAP PENYELESAIAN
KONFLIK INDIA – PAKISTAN MELALUI SECOND TRACK DIPLOMACY**



**OLEH:
SEPTIANY PUTRI AWALIA SAHRUL
E 06 117 1 003**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PELUANG DAN TANTANGAN FORUM PAKISTAN INDIA PEOPLES FORUM
FOR PEACE AND DEMOCRACY (PIFPD) TERHADAP PENYELESAIAN
KONFLIK INDIA – PAKISTAN MELALUI SECOND TRACK DIPLOMACY**



SKRIPSI

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH:

SEPTIANY PUTRI AWALIA SAHRUL

E 06 117 1 003

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN FORUM PAKISTAN INDIA
PEOPLES FORUM FOR PEACE AND DEMOCRACY (PIPFDP)
TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK INDIA-PAKISTAN
MELALUI *SECON TRACE DIPLOMACY*

N A M A : SEPTIANY PUTRI AWALIA SAHRUL

N I M : E061171003

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 21 Agustus 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

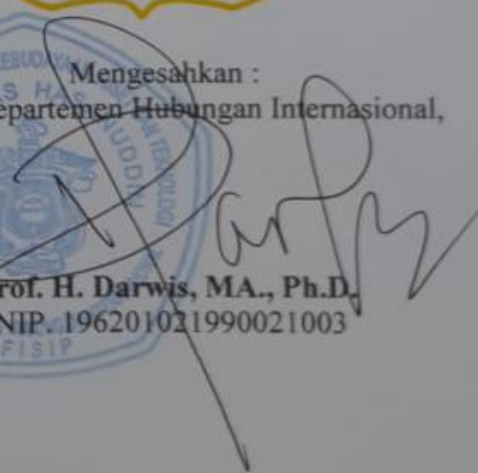
Pembimbing II,


Agussalim, S.IP, MIRAP,
NIP. 197608182005011003


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.,
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN FORUM PAKISTAN INDIA
PEOPLES FORUM FOR PEACE AND DEMOCRACY (PIFPD)
TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK INDIA-PAKISTAN
MELALUI *SECON TRACE DIPLOMACY*

NAMA : SEPTIANY PUTRI AWALIA SAHRUL

NIM : E061171003

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 14 Juli 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septiany Putri Awalia Sahrul

NIM : E061171003

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“PELUANG DAN TANTANGAN FORUM PAKISTAN INDIA PEOPLES FORUM
FOR PEACE AND DEMOCRACY (PIPFPD) TERHADAP PENYELESAIAN
KONFLIK INDIA-PAKISTAN MELAU SECOND TRACK DIPLOMACY”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang menyatakan



(Septiany Putri Awalia Sahrul)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
1. <i>Second Track Diplomacy</i>	15
2. Resolusi Konflik.....	17
3. Operasionalisasi Variabel.....	23
E. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. <i>Second Track Diplomacy</i>	28
B. Resolusi Konflik.....	37
C. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III KONFLIK INDIA – PAKISTAN DAN FORUM PAKISTAN INDIA PEOPLES FORUM FOR PEACE AND DEMOCRACY (PIPFDP)	45
A. Sejarah Konflik India-Pakistan.....	45
B. Resolusi Konflik India – Pakistan.....	49
1. Peacekeeping.....	49
2. Peacemaking.....	51
3. Peacebuilding.....	73
C. Forum Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFDP).....	75
BAB IV PELUANG DAN TANTANGAN FORUM PAKISTAN INDIA PEOPLES FORUM FOR PEACE AND DEMOCRACY (PIPFDP) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INDIA-PAKISTAN MELALUI SECOND TRACK DIPLOMACY	81
A. Upaya Penyelesaian konflik India – Pakistan Melalui Forum Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFDP).....	83
1. Upaya Melalui Konvensi.....	84

2. Upaya Melalui Publikasi Media Sosial.....	88
3. Upaya Melalui Diskusi	90
B. Peluang dan Tantangan Forum <i>Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy</i> (PIPFDP) terhadap Penyelesaian Konflik India – Pakistan	92
1. Peluang Forum <i>Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy</i> (PIPFDP) terhadap Penyelesaian Konflik India – Pakistan	92
2. Tantangan Forum <i>Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy</i> (PIPFDP) terhadap Penyelesaian Konflik India – Pakistan	96
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

ABSTRAK

Septiany Putri Awalia Sahrul, E061171003 dengan judul skripsi “Peluang dan Tantangan Forum Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) Terhadap Penyelesaian Konflik India – Pakistan Melalui Second Track Diplomacy” dibawah bimbingan Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP sebagai Pembimbing I dan Bapak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR sebagai Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk Second Track Diplomacy yang dilakukan oleh Forum Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) dalam upaya menyelesaikan konflik India – Pakistan. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Forum Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) dalam upaya menyelesaikan konflik India – Pakistan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada tiga bentuk Second Track Diplomacy yang dilakukan oleh Forum Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) dalam upaya menyelesaikan konflik India – Pakistan yakni Konvensi, Publikasi Media Sosial dan Diskusi-Diskusi. Dari ketiga kegiatan yang dilakukan itu, yang paling menunjukkan peluang adalah Konvensi yang telah diselenggarakan 8 (delapan) kali hingga saat ini. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Forum Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) yakni banyaknya pihak – pihak yang menentang kegiatan yang dilakukan oleh PIPFPD serta hubungan yang sangat longgar antara anggota forum dengan pejabat pemerintah.

Kata Kunci : Konflik India – Pakistan, Second Track Diplomacy, PIPFPD

ABSTRACT

Septiany Putri Awalia Sahrul, E061171003 with the thesis "Opportunities and Challenges of the Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) Against Conflict Resolution India - Pakistan Through Second Track Diplomacy" under the guidance of Mr. Agussalim, S.IP, MIRAP as supervisor I and Mr. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the forms of Second Track Diplomacy carried out by the Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) in an effort to resolve the India-Pakistan conflict. In addition, this research also aims to find out the opportunities and challenges faced by the Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) in efforts to resolve the India-Pakistan conflict. The results of this study indicate that there are three forms of Second Track Diplomacy carried out by the Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) in efforts to resolve the India-Pakistan conflict, namely conventions, social media publications and discussions. Of the three activities carried out, the one that shows the most opportunity is the Convention which has been held 8 (eight) times so far. The challenges faced by the Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) are the many parties that oppose the activities carried out by the PIPFPD and very loose relationships between member forums and government officials.

Keywords: India – Pakistan Conflict, Second Track Diplomacy, PIPFPD

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian	22
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel24

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu44

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran **Allah Subhanallahu Wa Ta'ala** yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Peluang dan Tantangan Forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPPD) Terhadap Penyelesaian Konflik India-Pakistan Melalui *Second Track Diplomacy*”** ini. Sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada **Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam** sebagai figur pedoman terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah menuntun kita beranjak dari zaman jahiliyah.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak **Muh. Sachrul R** dan Bunda **Hamsinar Hamid, S.H.I** yang dengan sepenuh hati telah memberikan dukungan baik secara finansial dan lisan sehingga menjadi semangat untuk penulis berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Tidak lupa penulis haturkan terima kasih kepada Adik tercinta **Feby Reski Wulandari Sachrul, A.Md.Kes** sebagai *support system* terbaik setelah kedua orang tua. Tidak lupa pula melalui lembaran ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dari pihak-pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

1. **Rektor Universitas Hasanuddin** beserta jajarannya.
2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.**
4. Pembimbing Skripsi penulis, Pembimbing I, **Agussalim, S.IP, MIRAP** dan Pembimbing II, **Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR**

Terima kasih atas segala masukan, saran, dan kritikan yang diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak pengetahuan yang diperoleh selama proses bimbingan dari beliau.

5. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Alm. Bapak Drs. Aspiannoor Masrie, M.Si., Bapak Dr. H. Adi Suryadi B, MA., Bapak Drs. Munjin Syafik, M.Si., Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D., Bapak Burhanuddin, S.IP, M.Si., Bapak Ishaq Rahman S.IP, M.Si., Bapak Dr. H. Husain Abdullah, M.Si., Ibu**

Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si, Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., Kak Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si., Kak Aswin Baharuddin, S.IP, MA., Kak Bama Andika Putra, S.IP, MIR., atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis dan terima kasih pula penulis haturkan kepada **Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** selaku Dosen PA yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.

6. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Kak Rahma** dan **Pak Ridho**. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi sejak penulis berstatus mahasiswa baru hingga menyelesaikan tugas akhir penulis.
7. Teman-teman “**Keluarga Marsudi**” **Ulwi, Mayang, Risna, Kiki Besar** dan **Wiwin**. Terima kasih telah kebersamaan selama masa perkuliahan terutama dalam proses penulisan skripsi.
8. Kepada seluruh teman angkatan “**LIBERTÈ 2017**”, khususnya teman-teman penghuni **kelas ganjil, Vivi, Afil, Alya, Kiki Kecil, Farah, Thama, Pipria, Cini, Ayi, Sita, Cici, Isa, Ony, Nisa, Nita, Ainul, Agal, Apro, Miftah, Yayang, Andika, Emil, Fadil, Danu** dan **Firul** yang senantiasa mewarnai hari-hari penulis selama masa studi.
9. Teman-teman “**IPPMP-UH 2017**” khususnya **Seulgi, Nunu, Ani, Inces, Aisyah, Asmy, Riska, Dian, Ade, Gias, Sufri, Jack, Alif, Zulham, Hasdar, Fachry** dan **Suha** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.

Sebagai akhir dari bagian ini, tentunya skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik diharapkan oleh penulis demi perkembangan ilmu yang tiada habisnya.

Wassalam

Makassar, 22 Agustus 2023

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembah Kashmir yang berupa tanah berbentuk oval yang tidak beraturan adalah salah satu tempat terindah di dunia. Pada peta lembah tampak terencil dan terkurung daratan, membentang tidak lebih dari 90 mil, terisolasi oleh deretan pegunungan Himalaya yang tinggi di atas dataran sub-benua. Namun, ketidaktertembusannya hanyalah ilusi. Lebih dari dua puluh lintasan memberikan titik masuk, menjadikan lembah ini sebagai persimpangan jalan dan tempat perlindungan. Sebuah catatan unik tentang sejarah Kashmir, Rajatarangini (Sejarah Raja-Raja), yang ditulis pada abad ke-12 oleh penyair Kalhana, menggambarkan bagaimana, sejak zaman legendaris, para penguasa lembah bersentuhan dan berkonflik dengan tetangga mereka (Schofield, 2003).

Wilayah Kashmir sendiri terletak di Ujung Barat Pegunungan Himalaya. Kashmir terbagi atas tiga wilayah yakni Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Kashmir juga berbatasan dengan tiga Negara yang berbeda yakni India, Pakistan, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kashmir merupakan salah satu wilayah rebutan terkenal di dunia dan menjadi penyebab salah satu konflik terpanjang dalam sejarah di Kawasan Asia Selatan yakni Konflik antara India dan Pakistan (Kelas Pintar, 2020).

Permusuhan yang terjadi antara Pakistan dan India berkembang secara bertahap sejak pendudukan India oleh Muslim. Periode pasca-kemerdekaan bukannya mengantarkan era baru sikap saling menghormati

dan kerja sama justru meningkatkan dan melembagakan konflik dan perselisihan. Lebih dari enam dasawarsa berjalan dan kedua Negara belum beranjak dari kondisi perdamaian yang rapuh dan menuai keuntungan dari kerjasama di berbagai bidang. Sejauh ini, semua upaya untuk membawa kedua tetangga ke penyelesaian yang masuk akal dan mempertahankan ego melalui negosiasi resmi telah gagal. Seringkali upaya setengah hati yang dilakukan di bawah paksaan asing lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Seperti yang dikatakan Moonis Ahmar, “Kurangnya kemauan politik dalam rezim India dan Pakistan untuk memperbaiki hubungan bilateral atas dasar kesetaraan dan koeksistensi damai memperburuk perpecahan sejarah dan ketidakpercayaan politik dan agama antara kedua negara” (Malik, 2011 & 2012).

Sejak kelahiran India dan Pakistan, ketidakpercayaan yang mengakar dan permusuhan selalu membahayakan hubungan antara kedua negara. Ada sejumlah masalah yang saling bertentangan antara India dan Pakistan tetapi Kashmir adalah masalah inti yang secara tegas menyebabkan memburuknya hubungan mereka. yang disengketakan Negara Bagian Kashmir telah mengambil banyak kepentingan strategis bagi kedua negara dan telah menjadi penyebab perlombaan senjata di antara mereka. Sejumlah rangkaian pembicaraan langsung dan tidak langsung telah diadakan antara India dan Pakistan untuk menormalkan hubungan untuk mencari solusi yang adil dari sengketa Kashmir tetapi setiap upaya telah gagal terutama karena pendekatan India yang acuh tak acuh terhadap masalah ini (Mirza, 2009).

Konflik antara India dan Pakistan yang memperebutkan wilayah Kashmir ini dimulai pada Oktober 1947, tepat dua bulan setelah Kerajaan Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan. Status Wilayah Kashmir yang masih tidak jelas kemudian memicu pertikaian antara India dan Pakistan yang sama-sama menginginkan wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir diperintah oleh India selama penjajahan Kerajaan Inggris. Setelah kemerdekaan, Pemerintah India menyerukan pencaplokan Kashmir, dan setelah beberapa peristiwa, Maharaja Kashmir mengumumkan pencaplokan wilayahnya. Sementara disisi lain, Pemerintah Pakistan memiliki tuntutan serupa untuk pencaplokan Kashmir ke wilayahnya karena mayoritas penduduk Kashmir adalah muslim (James & Ozdamar, 2005).

Konflik antara India dan Pakistan sejauh ini telah menyebabkan empat perang yakni pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999. Setelah perpecahan pada tahun 1947, Maharaja Kashmir dan beberapa wilayah lainnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan India. Pada Oktober 1947, suku-suku Muslim menyerang Kashmir. Akibat serangan itu, Maharaja Kashmir melarikan diri ke India dan mencari bantuan militer dari Pemerintah India. Pemerintah India memberikan bantuan kepadanya dengan balasan penandatanganan perjanjian aneksasi. Sehingga Maharaja terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Segera setelah perjanjian tersebut ditandatangani, tentara India bergerak menuju Kashmir dan menduduki wilayah tersebut. Akibatnya, tentara Pakistan bergerak menuju Jammu dan Kashmir yang kemudian menyebabkan perang antara India

dan Pakistan dimulai. Perang tersebut berlangsung selama beberapa hari yang kemudian berhenti dengan intervensi dari PBB dan pembentukan pemerintah untuk wilayah (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Menurut resolusi PBB, pemerintah India telah berjanji untuk membuka untuk referendum di Jammu dan Kashmir. Namun kesempatan ini tidak pernah diberikan kepada penduduk di wilayah tersebut. Hal ini membuat Pakistan dan penduduk Muslim yang tinggal di Kashmir merasa marah. Pada Agustus 1965, milisi Muslim menyusup ke wilayah Kashmir dan mencoba menghasut rakyat (Bose, 2003).

Terlepas dari semua rencana, Pasukan keamanan India mencegah pemberontakan lokal dan menyerahkan sejumlah besar pemberontak kepada pemerintah pusat India setelah mereka tertangkap. Setelah upaya Pakistan dalam komunitas internasional untuk membebaskan para tahanan gagal, Pakistan melancarkan serangan besar-besaran di Akhnoor pada tanggal 1 September 1965 untuk memutuskan jalur komunikasi Angkatan Darat India di Kashmir. Sebagai tanggapan, India memperluas front perangnya dan menargetkan kota Punjab, melintasi perbatasan resmi Pakistan. Perang Indo-Pakistan Kedua berlangsung hingga 22 September. Akhirnya, dengan ditandatanganinya Perjanjian Tashkent, kedua belah pihak kembali ke posisi mereka sebelum konflik dan sepakat untuk tidak ikut campur dalam urusan internal masing-masing (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Konfrontasi militer ketiga antara kedua Negara berlangsung pada tahun 1971. Jauh sebelum 1971, India mulai menghasut rakyat Pakistan Timur untuk memberontak terhadap pemerintah pusat Pakistan untuk memisahkan diri dari Negara tersebut kemudian membentuk sendiri Negara merdeka. Akhirnya, pada tanggal 26 Maret 1971, Pertempuran Bangladesh dimulai dengan serangan tentara Pakistan terhadap pemberontak Bengali. Pemerintah India telah beralih ke dukungan ekonomi, militer dan diplomatik untuk pemberontak Bengali untuk membuat hal-hal buruk untuk Pakistan sehingga membuat Pakistan marah. Kashmir mungkin tidak menjadi fokus dalam perang India-Pakistan ketiga kali ini. Tetapi sebenarnya, hal ini dimulai dengan pengeboman pendahuluan dari Angkatan Udara Pakistan terhadap 11 pangkalan udara militer India di Wilayah Kashmir. Perang ini berlangsung selama 13 hari. Selama perang, tentara India dan Pakistan bentrok secara bersamaan di front timur dan barat. Ketika pasukan Pakistan di front timur mendapatkan tekanan yang meningkat dan lebih dari 90.000 tentara Pakistan ditangkap oleh Tentara India dan pemberontak Bengali, Komando Timur Pakistan akhirnya akhirnya menyerah pada 26 Maret 1971, dan menandatangani Perjanjian Bangladesh (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Pada tahun 1999, milisi berorientasi Pakistan menduduki bagian-bagian wilayah yang dikuasai India di Kashmir yang disebut Ladakh . Setelah peristiwa ini, India mengerahkan pasukannya ke wilayah tersebut. Akibatnya, pertarungan sengit pecah antara kedua Negara, yang

menyebabkan direbutnya kembali sebagian besar wilayah yang hilang oleh India. Akhirnya, Pakistan terpaksa menarik diri dari wilayah yang tersisa di bawah tekanan internasional. Pertempuran ini merupakan konfrontasi serius terakhir antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Sengketa Kashmir sangat kompleks dan rentan terhadap penggunaan kekuatan kekerasan sebagaimana dibuktikan oleh sejarah. Sangat penting bahwa perselisihan ini harus melihat kesimpulan logis, berdasarkan aspirasi penduduk Kashmir sementara pada saat yang sama menjaga kepentingan Pakistan dan juga India (Sajid Ali, 2019). Selama bertahun-tahun banyak solusi telah diusulkan untuk masalah Kashmir. Ini termasuk partisi di sepanjang Garis Kontrol, "batas lunak" antara dua bagian Kashmir (menunggu solusi untuk keseluruhan masalah), plebisit (hak menentukan nasib sendiri) wilayah demi wilayah Kashmir, referendum, PBB perwalian, model "Trieste" dan "Andorra" (di mana wilayah yang sama dibagi oleh dua Negara, atau wilayah berdaulat nominal yang sebenarnya dikendalikan bersama oleh dua Negara), perang revolusioner, depopulasi Muslim Kashmir dan populasi kembali oleh umat Hindu dari India, kebangkitan "nilai-nilai kemanusiaan.". Tanggapan sebagian besar pengamat adalah "Ini tentang waktu" (Cohen, 2013).

Memburuknya konflik yang terjadi antara India dan Pakistan mengharuskan langkah-langkah diambil dari berbagai tingkat diplomasi untuk menyelesaikannya. Diplomasi, seni meyakinkan tanpa menggunakan *force*, dapat digambarkan sebagai modalitas utama regulasi

Hubungan Indo-Pakistan selain hubungan mereka yang berupa perang terbuka fase pendek (Lyon, 2008). Bersamaan dengan diplomasi resmi atau *First Track Diplomacy*, diplomasi tidak resmi/informal atau *Second Track Diplomacy* juga dijalankan untuk membantu penyelesaian konflik ini. *Second Track Diplomacy* muncul sebagai bentuk lain dari *First Track Diplomacy* yang sudah terlalu lama dan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan. Montville mendefinisikan *Second Track Diplomacy* sebagai interaksi informal (tidak resmi) antara anggota kelompok musuh atau Negara yang bertujuan untuk mengembangkan strategi, untuk mempengaruhi opini publik, mengatur sumber daya manusia dan material dengan cara yang dapat membantu menyelesaikan konflik mereka (Mapendere, 2006).

Upaya resmi dimulai sejak awal untuk memuluskan jalan hubungan yang tidak beraspal tetapi tidak ada kemajuan yang dicapai kecuali beberapa peristiwa tunggal. (Pakta Liaquat-Nehru, kesepakatan air cekungan Indus dan Runn of Khutch adalah contoh-contoh penting dari solusi damai dari masalah). Meskipun saluran resmi atau *First Track Diplomacy* adalah bentuk paling otentik dari resolusi konflik tetapi dalam kasus-kasus ekstrem tertentu, saluran ini berfungsi untuk memperbesar perbedaan. negara-negara modern sebagian besar dipimpin oleh perspektif realis hubungan internasional dan pembicaraan resmi mereka terhambat oleh pencarian kekuasaan dan perlindungan kepentingan inti. Konflik India – Pakistan adalah kasus yang dapat disebutkan dalam hal ini. Kegagalan saluran resmi memungkinkan faktor-faktor lain untuk terjun ke

medan untuk mencoba jalan keluar dari kebuntuan dengan mencoba mengikuti model perdamaian berdasarkan manajemen konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik.

Dalam kasus Pakistan dan India, ketiga model perdamaian ini dapat ditemukan dalam inisiatif perdamaian *Second Track Diplomacy* karena berbagai aktor berusaha mengubah matriks hubungan di antara mereka dan menyusun kembali hubungan dari konflik ke mode damai. Dalam kasus seperti itu, kegagalan jalur resmi, yaitu *First Track Diplomacy*, membuka jalan bagi *Second Track Diplomacy* dan jalur tidak resmi lainnya yang dalam bahasa umum dikenal sebagai diplomasi agama, diplomasi kriket, kontak orang ke orang, dan *Confidence Building Measures* (CBMs). Terlepas dari proyek-proyek yang didanai asing, sejumlah aktivis perdamaian lokal perlahan-lahan bangkit untuk mengambil penyebab *Second Track Diplomacy*, dengan para pemerhati lingkungan, seniman dan aktivis hak asasi manusia dari India dan Pakistan bertemu secara teratur dalam berbagai bentuk internasional dan regional, ada kebutuhan yang kuat untuk memulai dialog antara kedua negara (Malik, 2011 & 2012).

Hal tersebut yang kemudian mengarah pada pembentukan sebuah forum yang diberi nama *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFD) pada 2 September 1994 di Lahore setelah diadakan pertemuan antara beberapa aktivis perdamaian terkenal dari India dan Pakistan seperti Rajni Kothari, Nirmal Mukerji, Tapan Bose, Gautam Naulakha, Teesta Setalvad dari India dan I.A. Rehman, Mubashir Hassan,

B.M. Kutty, Madeeha Gouhar, Beena Sarwar, Mehdi Hassan, dll. dari Pakistan (Ahmad, 2014).

Pertemuan pertama PIPFPD diadakan pada 2 September 1994 di Lahore yang dihadiri oleh 15 orang Pakistan dan 9 orang India. Di akhir pertemuan, peserta mengeluarkan pernyataan pers yang menunjukkan agenda PIPFPD. Tujuannya adalah untuk memulai negosiasi *people to people* terkait isu-isu penting perdamaian dan demokrasi. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 25-26 November 1994 di Delhi. Pada pertemuan ini, struktur organisasi PIPFPD ditentukan, dan Rahman, Komisaris Pakistan untuk hak kemanusiaan dan Nirma Mukherjee, mantan gubernur Punjab India, terpilih sebagai dua presiden forum. Konvensi pertama forum PIPFPD diadakan pada 24 Februari 1995 di New Delhi. Konvensi ini dihadiri oleh kurang lebih 200 partisipan yang terdiri dari artis, broker, ilmuwan, pengrajin, akademisi, pebisnis, aktivis hak-hak perempuan, gerakan anti-nuklir, aktivis hak asasi manusia dan aktivis perdamaian. Topik yang dibahas dalam konvensi pertama antara lain mengenai perang, peradaban, perdamaian dan manfaat perdamaian, situasi di Jammu dan Kashmir, kebijakan intoleransi agama di India dan Pakistan, gugatan terkait pemerintahan Kashmir antara India dan Pakistan, diputuskan untuk dibahas di pertemuan selanjutnya (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Konvensi kedua diadakan pada tanggal 10-11 November 1995 di Lahore, dimana sekitar 200 individu dari kedua Negara telah berkumpul dan berjanji untuk bekerja untuk munculnya non-proliferasi penuh di

tingkat regional, demokratisasi bertahap di wilayah tersebut, mencapai resolusi demokratisasi untuk konflik Kashmir, menurut kecenderungan warga Negara. Partisipan juga memberikan saran tentang kesadaran publik, kecaman terhadap persepsi yang berperang dan intoleransi. Konvensi ketiga diadakan pada tanggal 28-31 Desember 1996 di Calcutta. Hampir 300 orang dari dua Negara menghadiri konferensi tersebut. Konvensi Calcutta memutuskan untuk pertama kalinya merujuk langsung kepada orang-orang Kashmir. PIPFPD dalam komite bersama untuk masalah Kashmir telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan rutin dengan para pemimpin Kashmir dengan anggota parlemen India dan Pakistan, dengan tujuan memberikan tekanan untuk mengurangi larangan di garis control untuk pergerakan bebas orang, perdagangan, dan lain-lain (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Konvensi keempat diadakan pada tanggal 21-22 November 1998 di Peshawar. Sekitar 300 perwakilan dari India dan Pakistan, termasuk anggota serikat pekerja, akademisi, pengacara, pendidik profesional, pensiunan perwira militer, pekerja sosial, jurnalis dan anggota parlemen menghadiri konferensi tersebut. Konvensi Peshawar menjadi sangat penting pada tahun 1998 karena meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan atas uji coba nuklir. Konvensi kelima diadakan pada tanggal 6-8 April 2000 di Bangalore. Hampir 300 orang dari kedua Negara menghadiri konferensi tersebut. Forum kelima diadakan dalam kondisi yang sangat sulit. Perang Kargali memperburuk hubungan India-Pakistan. Hasil dari pertemuan ini adalah resolusi Bangalore. Selain itu, dua

kelompok kerja globalisasi dan kerjasama regional ditambahkan ke kelompok kerja lainnya (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Konvensi keenam diselenggarakan pada 12-14 Desember 2003 di Karachi. Sekitar 600 orang menghadiri forum tersebut. Forum Karachi juga berlangsung pada saat yang sangat penting dalam sejarah hubungan India dan Pakistan. Dari 13 Desember 2001 hingga musim panas 2003, pasukan militer India dan Pakistan berada di perbatasan antara kedua Negara, karena serangan terhadap Parlemen India oleh teroris yang dikaitkan dengan Pakistan. Tindakan ini memperburuk hubungan kedua Negara. Namun, pada Oktober 2003, dengan usulan langkah-langkah membangun kepercayaan oleh perdana menteri Pakistan, situasinya entah bagaimana membaik. Forum ketujuh diadakan pada tanggal 25-28 Februari 2005 di New Delhi dengan partisipan hampir 650 orang dari kedua sisi perbatasan. Delegasi dari Kashmir Pakistan, menghadiri forum untuk pertama kalinya dihadiri oleh hamper 100 generasi muda, 22 diantaranya berasal dari Pakistan (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Forum kedelapan diadakan pada 29-31 Desember 2011 di Allahabad, India. Pembentukan forum ketujuh tertunda selama enam tahun dan dihadiri oleh kurang dari 200 orang. Sebenarnya kali ini giliran Pakistan yang menggelar forum tersebut, namun hal itu tidak terjadi karena ketidakamanan Pakistan dan merebaknya aksi terorisme di Negara tersebut. Enam tahun hiatus telah menyebabkan kerusakan serius pada

tubuh kegiatan, dan penurunan jumlah peserta yang kemudian menandakan bahwa gerakan melemah. Tidak ada pertemuan bersama lainnya dengan dimensi yang disebutkan telah diadakan sejak 2011. Menurut presiden organisasi, forum kesembilan dijadwalkan akan diadakan di Lahore pada tahun 2019 dengan 115 partisipan tokoh India, tetapi ini tidak terjadi. Karena PIPFPD telah mengorganisir lembaga dalam berbagai format di India dan Pakistan, pertemuan biasanya diadakan di tingkat nasional. Misalnya, PIPFPD India mengadakan konvensi nasionalnya antara tanggal 20 dan 22 September 2013 di New Delhi. Konvensi yang berpusat pada “*Peace and Democracy in South Asia: Emerging Challenges*”, dan mempertemukan lebih dari 160 delegasi dari seluruh India, bersama dengan delegasi aktif Pakistan (Neginraz, Sujjadpour, Siraki, & Sheikholeslam, 2019).

Di luar forum-forum konvensi yang telah dilaksanakan, forum PIPFPD memiliki akun resmi di media sosial *facebook* dan merilis pernyataan-pernyataan terkait masalah atau isu yang sedang dihadapi oleh kedua negara. Selain itu, pada akun resmi tersebut juga sering diadakan diskusi-diskusi terkait isu-isu yang dihadapi via *online zoom meeting*. Diskusi terakhir yang diadakan yakni pada tanggal 4 Oktober 2021 terkait *Afghanistan Crisis and the Region: Civil Society Perspectives* yang diselenggarakan via *online zoom meeting*.

Pakistan India People’s Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) adalah salah satu kegiatan *Second Track Diplomacy* yang paling penting dalam menyelesaikan Konflik India-Pakistan. Kegiatan dari forum

ini berhasil menunjukkan dimensi yang berbeda dari konflik untuk publik dan elit di sepanjang perbatasan, akan tetapi tidak bisa mewujudkan perdamaian jangka panjang. Pencapaian terpenting yang harus diperhitungkan dari PIPFPD adalah mengurangi ketegangan, terutama saat terjadi kebuntuan diplomatik. Diluar dari keberhasilan tersebut, PIPFPD juga mengalami kegagalan dalam beberapa tujuan yang telah ditentukan. Karena itu penulis tertarik untuk membahas hal-hal apa saja yang menjadi peluang dan hambatan PIPFPD dalam usahanya untuk menyelesaikan Konflik India-Pakistan bahkan setelah lebih dari 27 tahun beraktifitas.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada latar belakang masalah, maka pembahasan tulisan ini akan berfokus pada konteks peluang dan tantangan yang dihadapi Forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD) terhadap penyelesaian konflik India dan Pakistan melalui *Second Track Diplomacy*. Penulis akan membahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum PIPFPD dalam upayanya untuk menyelesaikan Konflik India-Pakistan yang berupa konvensi-konvensi yaitu konvensi pertama pada tahun 1995 hingga konvensi kedelapan pada tahun 2011. Selain itu, penulis juga akan membahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah konvensi terakhir pada 2011 yang masih berlangsung hingga 2021 yang berupa diskusi-diskusi yang diselenggarakan via *online zoom meeting* dan *press release* yang di upload dilaman akun resmi media sosial *facebook*. Pada konvensi-konvensi dan diskusi tersebut dapat dilihat kegiatan apa saja yang menjadi

fokus tujuan serta pencapaian/peluang dan tantangan yang dihadapi oleh forum PIPFPD dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik India-Pakistan. Karenanya penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya - upaya *Second Track Diplomacy* yang dilakukan oleh Forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD) dalam penyelesaian konflik India – Pakistan?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD) terhadap penyelesaian konflik India dan Pakistan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Upaya - upaya Forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD) dalam penyelesaian konflik India dan Pakistan.
- b. Peluang dan Tantangan yang dihadapi Forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD) terhadap penyelesaian konflik India dan Pakistan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan bahan perbandingan serta sebagai sumber acuan untuk bidang kajian yang sama.

D. Kerangka Konseptual

1. *Second Track Diplomacy*

Second Track Diplomacy menggambarkan bentuk-bentuk interaksi antara individu atau kelompok yang terjadi diluar proses negosiasi resmi. Jadi sementara *First Track Diplomacy* mengacu kepada semua bentuk jalur resmi seperti diplomasi pemerintah (bilateral maupun multilateral), *Second Track Diplomacy* mengacu kepada semua kegiatan lain yang terjadi diluar jalur resmi pemerintah (Kaye, 2005).

John McDonald dan Louise Diamond menjelaskan bahwa *Second Track Diplomacy* mengacu kepada ‘non-pemerintah, kontak dan aktivitas informal dan tidak resmi antara warga negara atau kelompok individu, biasa disebut actor non-negara (*non-state actor*). John McDonald menawarkan definisi yang serupa, menunjukkan bahwa interaksi informal atau tidak resmi yang terjadi antara warga negara atau kelompok individu dalam suatu negara atau antarnegara yang berada diluar kekuatan struktur pemerintahan resmi (Kaye, 2005). Montville mendefinisikan *Second Track Diplomacy* sebagai interaksi informal (tidak resmi) antara anggota kelompok musuh atau negara

yang bertujuan untuk mengembangkan strategi, untuk mempengaruhi opini publik, mengatur sumber daya manusia dan material dengan cara yang dapat membantu menyelesaikan konflik mereka (Jones, 2015).

Montville menekankan bahwa *Second Track Diplomacy* atau *Two Track Diplomacy* ini bukan merupakan pengganti dari *First Track Diplomacy*, tetapi lebih mengacu kepada sebuah usaha atau bentuk diplomasi lain yang digunakan untuk mengimbangi kendala-kendala yang dialami oleh para pemimpin dalam menjalankan *First Track Diplomacy*. Intinya, *Second Track Diplomacy* ini diharapkan atau dimaksudkan untuk menyediakan sebuah jembatan atau melengkapi negosiasi resmi yang dilaksanakan melalui *First Track Diplomacy*. Seperti yang dikatakan oleh Kenneth Boulding “*When track one simply will not do, We have to travel on track two. But for the results to be abiding the tracks must meet upon some siding*” (McDonald & Bendahmane, 1987).

Diplomasi Jalur II sering diartikan sebagai proses dialog tidak resmi antar non-resmi perwakilan pihak-pihak yang bersengketa. Perlu ditekankan di sini bahwa kelompok-kelompok tidak resmi ini terdiri dari orang-orang berpengaruh yang tetap ada pejabat pemerintah dalam berbagai kapasitas dan terus memiliki akses yang diperlukan ke pemerintah masing-masing atau diketahui memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dalam satu bentuk atau lainnya. Pengamatan yang cermat terhadap kelompok-kelompok ini mengungkapkan bahwa dua karakteristik tampaknya lebih terlihat

daripada yang lain: semua anggota kelompok ini sepenuhnya menyadari kebutuhan untuk menyelesaikan perselisihan secepat mungkin dan semua memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi konstruktif terhadap resolusi yang diinginkan dari konflik berkelanjutan. Banyak dari individu-individu ini sudah terlibat dalam kapasitas individu mereka, untuk memperbaiki situasi daerah konflik baik melalui tulisan-tulisan mereka (baik umum maupun penelitian) atau melalui pengajaran, atau penyelenggaraan seminar dan konferensi (Cheema, 2006).

2. Resolusi Konflik

Konsep Resolusi Konflik dalam kehidupan sosial warga negara, baik dari ruang lingkup yang paling kecil seperti keluarga hingga ruang lingkup yang luas seperti kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak luput dari adanya konflik. Konflik sendiri bersifat inheren, yang artinya adalah konflik dapat terjadi kapan dan dimana saja. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial konflik akan selalu melekat tanpa diketahui kapan dan dimana akan terjadi. Pada dasarnya konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, baik individu, kelompok, ataupun negara. Dalam prakteknya sendiri, konflik dapat diselesaikan dengan jalan damai, akan tetapi ada pula konsep yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur damai dimana sumber permasalahannya tidak dapat diatasi dengan baik dan mengakibatkan konflik semakin parah, sehingga dalam hal ini diperlukan tindakan kekerasan sebagai upaya resolusi konflik (Simanjuntak, 2020).

Resolusi konflik dapat didefinisikan sebagai situasi dimana pihak-pihak yang berkonflik menyetujui kesepakatan yang memecahkan ketidakcocokan utama mereka, menerima keberadaan satu sama lain yang berkelanjutan sebagai pihak dan menghentikan semua tindakan kekerasan terhadap satu sama lain (Wallensteen, 2002). Resolusi Konflik bagi sebagian orang, tampaknya menawarkan alternatif untuk membuat perdamaian dunia melalui teknik dan metode yang dapat menyelesaikan konflik. Sebagian besar fokusnya adalah pada aktor individu, atau kumpulan kecil aktor yang bekerja untuk menyelesaikan konflik antarpribadi, organisasi atau komunitas. Resolusi konflik internasional juga telah menjadi area fokus yang sangat penting, akan tetapi dalam skala internasional telah sebagian besar diserahkan kepada para diplomat dan praktisi konflik PBB.

Teks resolusi konflik menekankan pada generasi yang imajinatif dan kreatif alternatif, pemberdayaan yang lemah, dan mencari perubahan tanpa kekerasan. Resolusi konflik telah didefinisikan sebagai situasi:

“Di mana pihak-pihak yang berkonflik menjalin kesepakatan yang memecahkan pusat ketidakcocokan mereka, saling menerima lanjutan eksistensi sebagai pihak, dan menghentikan semua tindakan kekerasan melawan satu sama lain” (Wani, Suwarta, & Payeye, 2013)

Ini berarti, tentu saja, resolusi konflik itu adalah sesuatu yang harus ada setelah konflik.

Sharp mendefinisikan resolusi konflik sebagai cara yang beragam di mana konflik diselesaikan tanpa kekerasan. Cara-cara tersebut termasuk arbitrase, konsiliasi, tindakan yudisial atau legislatif, negosiasi dan pendekatan lainnya. Seorang pendidik perdamaian terkenal mengatakan,

“Konflik adalah bagian dari semua kehidupan kita: namun hanya sedikit dari kita yang memiliki keterampilan untuk mengubah konflik dari proses destruktif yang menyakitkan menjadi pembelajaran yang signifikan dan perubahan konstruktif”.

Dia dengan meyakinkan berpendapat bahwa resolusi konflik adalah salah satu fungsi kekerasan (Coleman, Deutsch, & Marcus, 2014).

Menurut Johan Galtung, kerangka resolusi konflik melalui tiga proses yaitu *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* dapat didefinisikan sebagai proses menghentikan atau mengurangi kekerasan melalui intervensi militer dengan perannya sebagai penjaga perdamaian netral. Dalam proses ini, situasi disajikan dengan aktor eksternal (pihak ketiga) yang campur tangan dalam konflik untuk mengurangi ketegangan antara pihak-pihak dalam konflik. Dalam konflik India-Pakistan terjadi perang pada tahun 1947 selama beberapa hari yang kemudian berhenti dengan adanya intervensi dari PBB dan pembentukan pemerintah untuk wilayah (Firmansyah, 2019)

Peacemaking dapat didefinisikan sebagai proses yang melibatkan negosiasi, arbitrase, mediasi dengan para pemimpin elit untuk mendamaikan sikap politik dan strategi para pihak dalam konflik.

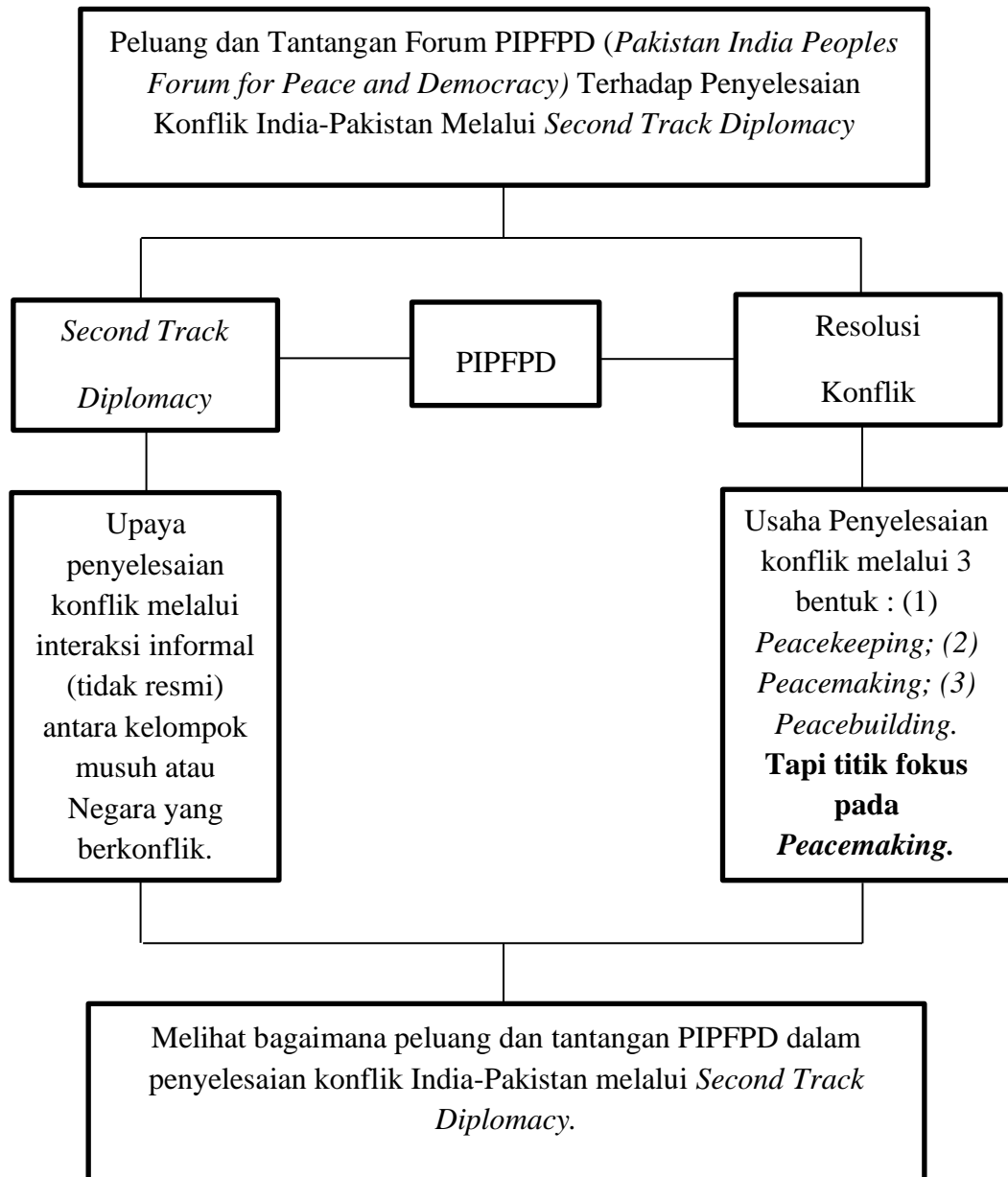
Dalam proses ini, negosiasi dapat menjadi pilihan yang baik akan tetapi mungkin akan sulit untuk dicapai karena adanya perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang saling bertentangan. Meskipun begitu negosiasi dapat menjadi pilihan yang baik dan memberikan kemungkinan alternatif. Ini menjadi pilihan lain yang dapat ditempuh untuk mencapai solusi dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjadi mediator (Firmansyah, 2019).

Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy merupakan forum yang dibentuk sebagai suatu upaya untuk mempertemukan delegasi dari kedua belah pihak yang berkonflik yakni India dan Pakistan untuk mendiskusikan perumusan strategi untuk mempromosikan perdamaian dan memperkuat demokrasi. Dalam forum ini, delegasi dari kedua belah pihak yang terdiri dari aktivis hak-hak demokrasi, pebisnis, serikat pekerja, pecinta lingkungan, gerakan perempuan, seniman, penulis, pekerja sosial, professional, akademisi, mahasiswa, ilmuwan dan gerakan massa bersama-sama membujuk pemerintah masing-masing untuk masuk kedalam negosiasi yang bermakna dan mengadopsi kebijakan yang akan mengurangi ketegangan dan membuka jalan bagi perdamaian dan persahabatan antara kedua negara. Sejauh ini, PIPFPD telah menyelenggarakan konvensi bersama sebanyak delapan kali sejak februari 1995 sampai desember 2011 (PIPFPD, 2019).

Peacebuilding dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan perubahan, rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dengan proses tersebut, perdamaian negative (tidak adanya kekerasan) bisa menjadi perdamaian positif, situasi dimana masyarakat dapat merasakan keberadaan kesejahteraan ekonomi, representasi politik yang efektif dan keadilan sosial. Proses pembangunan perdamaian dapat dilakukan melalui penciptaan struktur perdamaian dan lembaga sesuai dengan kerjasama, keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, proses tersebut dapat mengatasi penyebab konflik dan mencegah pihak-pihak dalam konflik melakukan kekerasan (Firmansyah, 2019).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan konsep *Second Track Diplomacy* dan Resolusi Konflik.

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Diolah oleh penulis

3. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen pada penelitian. Variabel independen juga dapat menjadi sebab dari perubahan yang mengakibatkan timbulnya variabel dependen. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dapat dikatakan pula sebagai akibat dari adanya variabel bebas pada penelitian. Variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD). Sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah penyelesaian konflik India-Pakistan. Peneliti memilih satu dari tiga bentuk penyelesaian konflik yang paling sesuai dengan judul penelitian yang akan menjadi fokus penelitian yaitu *peacemaking*. Kedua variabel ini akan dianalisis menggunakan tiga pendekatan terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi Forum PIPFPD yakni aktivitas forum yang berupa konvensi, publikasi media sosial, dan diskusi-diskusi dalam uraian operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen		Variabel Independen	Kategori		Indikator
<i>Peace making</i>	Penyelesaian Konflik India – Pakistan	Forum PIPFPD (<i>Pakistan India Peoples For Peace and Democracy</i>)	Aktivitas Forum	Konvensi	Jumlah Partisipan
					Substansi Konvensi
				Publikasi Media Sosial	Jenis Media Sosial
					Sasaran Audience
					Substansi Publikasi
				Diskusi – Diskusi	Jumlah Partisipan
Frekuensi Diskusi					
Substansi Diskusi					

Sumber : Diolah oleh Penulis

Ketiga aspek yang telah dijabarkan sebelumnya akan diproyeksikan dalam proses analisis data sehingga dapat dikemukakan bahwa adanya pengaruh aktivitas Forum PIPFPD dan dampaknya dalam upaya penyelesaian Konflik antara India dan Pakistan. Aktifitas forum seperti konvensi, publikasi media sosial, dan diskusi-diskusi yang membahas isu-isu terkait konflik antara India dan Pakistan akan digunakan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum PIPFPD yang berpengaruh terhadap terbukanya peluang dan munculnya tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Forum PIPFPD itu sendiri dalam upayanya untuk menyelesaikan Konflik India – Pakistan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah kualitatif-deskriptif. Metode penelitian ini akan menjelaskan bagaimana bentuk penyelesaian konflik India Pakistan dalam *Second Track Diplomacy* melalui Forum PIPFPD (*Pakistan India Peoples Forum Foe Peace and Democracy*). Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, dari hasil penjabaran tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik telaah pustaka (*Library Research*) untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Data-data diperoleh melalui buku, jurnal baik local maupun internasional, dokumen, laporan, artikel, yang diperoleh dari berbagai media online seperti situs-situs resmi yang memuat atau mendukung seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penulisan ini. Adapun sumber data yang diperoleh penulis dari laporan dan dokumen yang berasal dari situs resmi, seperti *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD), PIPFPD – India, dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, handbook, situs internet, institusi dan lembaga terkait. Adapun data yang diperoleh ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang Peluang dan Tantangan Forum PIPFPD (*Pakistan India Peoples Forum Foe Peace and Democracy*) Terhadap Penyelesaian Konflik India Pakistan Melalui *Second Track Diplomacy*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan

fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.
(Hardani, 2020)

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Second Track Diplomacy*

Perang antar negara di beberapa wilayah dunia saat ini masih berlangsung. Kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dinegosiasikan membuat perang terus berjalan hingga saat ini. Salah satunya adalah konflik perebutan wilayah Kashmir yang terjadi antara India dan Pakistan. Konflik antar dua negara terhadap perebutan wilayah yang subur dan strategis merupakan masalah yang kerap terjadi dan menjadi isu global.

Dalam konflik yang tidak dapat diselesaikan, instrumen tradisional negosiasi, mediasi, dan manajemen konflik terbukti tidak efektif. Dalam beberapa kasus, ini karena konflik itu sendiri belum "matang" untuk diselesaikan. Dengan kata lain, salah satu atau kedua belah pihak mungkin tidak memiliki motif yang kuat untuk meredakan ketegangan karena mereka yakin bahwa biaya untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik melebihi manfaatnya. Bahkan ketika de-eskalasi akan bermanfaat, masyarakat mungkin terlalu terpecah untuk mengizinkan inisiatif yang berani untuk de-eskalasi, atau konflik dapat terjalin dengan konflik regional atau global lainnya. (Chigas, 2003)

Istilah perantara mengacu pada orang-orang yang terlibat di tengah konflik. Mereka bukan pihak yang berselisih, melainkan orang-orang yang mencoba bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik atau mengubahnya agar tidak terlalu merusak. Terkadang perantara ini adalah perantara resmi atau formal seperti mediator profesional, arbiter, hakim, atau aktor resmi lainnya. Namun seringkali mereka adalah orang-

orang informal atau tidak resmi yang bekerja di luar proses negosiasi, mediasi, atau jalur resmi. Intervensi pihak ketiga informal memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Pada tingkat antarpribadi, ini mengacu pada proses mediasi informal apapun. Contohnya, seorang teman yang mengintervensi antara pasangan yang sedang bertengkar atau rekan kerja yang mencoba membantu dua karyawan menyelesaikan perselisihan. Siapa pun yang mencoba membantu pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka, tetapi melakukannya sebagai teman atau pihak ketiga tidak resmi merupakan perantara informal. (Chigas, 2003)

Ditingkat antar-kelompok atau internasional, istilah tersebut mencakup sejumlah istilah yang berbeda seperti, diplomasi jalur dua, diplomasi warga, diplomasi multi-jalur, diplomasi tambahan, pra-negosiasi, konsultasi, resolusi konflik interaktif, dan saluran belakang diplomasi. Meskipun berbeda dalam penekanan, agenda, dan pendekatan teoretis, inisiatif-inisiatif ini memiliki banyak tujuan yang sama. Mereka berusaha untuk menyediakan lingkungan yang rendah hati, tidak menghakimi, tidak memaksa, dan aman, untuk menciptakan proses di mana peserta merasa bebas untuk berbagi persepsi, ketakutan dan kebutuhan, dan untuk mengeksplorasi ide-ide untuk resolusi, bebas dari keterbatasan posisi pemerintah. Proses ini dirancang untuk mendorong pengembangan saling pengertian tentang persepsi dan kebutuhan yang berbeda, penciptaan ide-ide baru, dan hubungan pemecahan masalah yang kuat. (Chigas, 2003)

Biasanya, perantara informal adalah aktor non-pemerintah, seperti lembaga keagamaan, akademisi, mantan pejabat pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan sebagainya. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah atau pejabat pemerintah dapat bertindak sebagai perantara informal ketika mereka memfasilitasi diskusi di antara non-pejabat -- warga negara atau kelompok individu -- dari pihak yang bertikai. (Chigas, 2003)

Second Track Diplomacy atau diplomasi jalur dua adalah serangkaian diplomasi informal yang disetujui oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang terkait dengan diplomasi formal. Pertemuan jalur dua biasanya membahas topik yang berbeda-beda, tetapi umumnya digunakan untuk tujuan eksplorasi, dan dapat terjadi baik secara independen atau bersamaan dengan negosiasi resmi, biasanya dengan profil rendah. Diplomasi informal semacam ini umumnya dipahami sebagai pertemuan eksplorasi (yaitu tidak mengikat) yang dilakukan seringkali di balik pintu tertutup oleh warga negara yang terhubung dengan aparat resmi pemerintah negara-negara yang terlibat. (Chen, 2021)

Meninjau pada buku yang ditulis oleh Peter Jones yang berjudul *Second Track Diplomacy in Theory and Practice, Second Track Diplomacy* didefinisikan sebagai:

Unofficial, Informal interaction between members of adversarial groups or nations with the goals of developing strategies, influencing public opinion, and organizing human and material resources in ways that might help resolve the conflict (Jones, 2015).

Berdasarkan dari kutipan diatas, dimana Montville mendefinisikan *Second Track Diplomacy* sebagai interaksi informal (tidak resmi) antara anggota kelompok musuh atau negara yang bertujuan untuk mengembangkan strategi, untuk mempengaruhi opini publik, mengatur sumber daya manusia dan material dengan cara yang dapat membantu menyelesaikan konflik di antara mereka.

Second Track Diplomacy merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Joseph Montville, seorang petugas luar negeri Amerika Serikat. Montville menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan dialog resolusi konflik tidak resmi pada tahun 1981.

Meninjau pada tulisan Dalia Dassa Kaye yang berjudul *Rethinking Track Two Diplomacy : The Middle East and South Asia*, dimana *Second Track Diplomacy* diartikan sebagai: “*non-governmental, informal and unofficial contacts and activities between private citizens or groups of individuals, sometimes called ‘non-state actors’*” (Kaye, 2005)

Berdasarkan kutipan di atas, dimana John McDonald dan Louise Diamond menjelaskan bahwa *Second Track Diplomacy* mengacu kepada non-pemerintah, kontak dan aktivitas informal atau tidak resmi antara warga negara atau kelompok individu yang biasanya disebut actor non-negara. John McDonald juga menawarkan definisi yang serupa, menunjukkan bahwa interaksi informal atau tidak resmi yang terjadi antara warga negara atau kelompok individu dalam suatu negara atau antar negara yang berada diluar kekuatan struktur pemerintahan resmi (Kaye, 2005).

1.1 Kelebihan Second Track Diplomacy

Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh *Second Track Diplomacy*, antara lain (1) *Second Track Diplomacy* tidak dipengaruhi dan terhambat oleh politik ataupun kekuasaan konstitusional sehingga pelaku dapat mengekspresikan sudut pandang mereka sendiri pada isu-isu yang secara langsung mempengaruhi masyarakat dan keluarga mereka; (2) *Second Track Diplomacy* tidak memiliki rasa takut akan kehilangan konstituen karena mereka sendiri merupakan konstituen; (3) *Second Track Diplomacy* memberdayakan kelompok-kelompok yang kehilangan haknya secara sosial, ekonomi, dan politik dengan memberikan mereka sebuah platform dimana mereka dapat mengemukakan pendapat atau pandangan mereka tentang bagaimana perdamaian dapat dicapai dalam komunitas atau Negara mereka sendiri; (4) *Second Track Diplomacy* efektif pada tahap konflik pra-kekerasan dan pasca-kekerasan, oleh karena itu, *Second Track Diplomacy* merupakan alat yang sangat efektif untuk pencegahan konflik kekerasan dan pembangunan perdamaian pasca-konflik; (5) *Second Track Diplomacy* melibatkan kepemimpinan dari kalangan bawah dan menengah yang bersentuhan langsung dengan konflik; dan (6) *Second Track Diplomacy* tidak terpengaruh oleh siklus pemilu.

Kelebihan lain yang dimiliki oleh *Second Track Diplomacy* yakni meskipun pejabat pemerintah tidak berpartisipasi, kerangka kerja ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang posisi dan persepsi. Karena para ahli di luar pemerintahan dapat berbagi

kemandirian dan pandangan pribadi dengan cara yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam proses kebijakan. Dalam kebanyakan kasus, peserta ini akrab dengan posisi pemerintah masing-masing, tetapi tidak diharapkan untuk mengambil atau mempertahankan posisi kebijakan tersebut dalam dialog. Ketidakhadiran pejabat pemerintah terkadang dapat mengarah pada diskusi yang lebih terbuka, dengan kemungkinan lebih besar untuk menerobos jalan buntu yang sulit daripada yang mungkin terjadi jika pejabat berada di dalam ruangan. Selanjutnya, *Second Track Diplomacy* dapat membangun saluran sekunder dari komunikasi yang dapat membantu membangun kepercayaan antara kelompok peserta (Staats, Walsh, & Tucci, 2019).

1.2 Kekurangan Second Track Diplomacy

Terlepas dari kelebihan - kelebihan yang dimiliki, *Second Track Diplomacy* juga tentunya memiliki kekurangan yang antara lain (1) Pelaku *Second Track Diplomacy* memiliki kemampuan yang terbatas untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan struktur kekuasaan politik karena kurangnya kekuatan politik yang dimiliki; (2) Intervensi *Second Track Diplomacy* dapat memakan waktu yang terlalu lama untuk membuahkan hasil; (3) *Second Track Diplomacy* memiliki kemampuan terbatas untuk mempengaruhi perubahan pada tahap konflik perang; (4) Pelaku *Second Track Diplomacy* jarang memiliki sumber daya yang diperlukan untuk negosiasi dan implementasi perjanjian secara berkelanjutan; (5) *Second Track Diplomacy* tidak efektif dalam rezim otoriter dimana para pemimpin otoriter tidak akan

menerima nasihat dari para pimpinan tingkat bawah; (6) Karena Kurangnya kekuatan politik yang dimiliki oleh pelaku *Second Track Diplomacy*, dalam banyak kasus mereka tidak dapat bertanggungjawab kepada publik atas keputusan yang buruk; dan (7) *Second Track Diplomacy* dikenal dengan kurangnya koordinasi karena terlalu banyak aktor/organisasi yang berperan dalam di dalamnya (Mapendere, 2006).

Montville menekankan bahwa *Second Track Diplomacy* atau Two Track Diplomacy ini bukan merupakan pengganti dari *First Track Diplomacy*, tetapi lebih mengacu kepada sebuah usaha atau bentuk diplomasi lain yang digunakan untuk mengimbangi kendala-kendala yang dialami oleh para pemimpin dalam menjalankan *First Track Diplomacy*. Intinya, *Second Track Diplomacy* ini diharapkan atau dimaksudkan untuk menyediakan sebuah jembatan atau melengkapi negosiasi resmi yang dilaksanakan melalui *First Track Diplomacy*. Seperti yang dikatakan oleh Kenneth Boulding “*When track one simply will not do, We have to travel on track two. But for the results to be abiding the tracks must meet upon some siding*” (McDonald & Bendahmane, 1987)

Secara umum, literatur resolusi konflik optimis tentang prospek dari diplomasi jalur dua, pemahaman yang berlaku adalah bahwa karena pertemuan jalur dua memiliki komitmen rendah dan tidak menonjol secara publik, pertemuan tersebut merupakan alat diplomatik yang efektif untuk menjelajahi area sensitif politik internasional. fakta bahwa pertemuan jalur dua melengkapi diplomasi resmi karena profil publik mereka yang rendah menambah minat baru-baru ini tentang bagaimana kerahasiaan penting

dalam interaksi antar negara. Meski pertemuan *track two* seringkali tidak sepenuhnya dirahasiakan, mereka cenderung kurang terlihat oleh publik, terutama jika dibandingkan dengan pertemuan resmi *track one*. Mereka jarang diliput di media arus utama, dan karena pesertanya biasanya terdiri dari akademisi dan mantan pejabat, pertemuan-pertemuan ini akan sering muncul ke publik sebagai acara akademis atau *think tank* (Chen, 2021).

Dengan demikian, pendaftar untuk pertemuan jalur dua hanya dilakukan oleh pengamat yang paling tertarik, kemudian menghilang tanpa memasuki ranah publik. Mirip dengan sinyal "*offstage*" mereka membiarkan negara bagian membagi audiens mereka, memungkinkan komunikasi di antara pihak-pihak terkait tanpa menimbulkan biaya audiens publik yang tinggi. Lebih lanjut, karena peserta jalur dua adalah warga negara, pemerintah memiliki penyangkalan yang masuk akal bahkan jika pertemuan menjadi sangat dipublikasikan (Chen, 2021).

Harapan langsung dari diskusi ini adalah diplomasi jalur dua akan mengarah pada peningkatan kerjasama formal. Namun, menentukan jenis hubungan satu arah ini melewati sejauh mana diplomasi jalur dua sebagai proses bersama. Sebaliknya, efektivitas diplomasi jalur dua harus dipelajari dalam hal interdependensinya dengan kerja sama diplomasi formal. Hubungan semacam ini dapat dipahami dari kerangka delegasi di mana, dalam keseimbangan, agen (yaitu peserta *track two*) hanya memilih skenario di mana upaya mereka tidak akan ditolak oleh prinsipal. Sementara jalur diplomasi dua sebagian besar bekerja sebagian dengan berada di luar aparat pemerintah, adalah kunci bahwa peserta mereka tetap

terhubung dengan pemerintah pejabat karena memfasilitasi arus informasi antara dua jalur. Ini memungkinkan peserta jalur dua untuk mengantisipasi bidang kerja sama yang dapat diterima untuk menghindari upaya yang sia-sia dan tidak disukai oleh pemerintah. Artinya tidak hanya diplomasi jalur dua yang akan memudahkan kerja sama jalur satu, tetapi juga akan semakin melimpah dimana terdapat kerja sama jalur satu (Chen, 2021).

Dalam upaya penyelesaian konflik antara India-Pakistan, dimana *First Track Diplomacy* atau diplomasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah dianggap telah sampai pada jalan buntu. Maka usaha berikutnya yang digunakan adalah dengan menerapkan *Second Track Diplomacy* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Montville mengungkapkan bahwa *Second Track Diplomacy* merupakan suatu bentuk interaksi informal atau tidak resmi yang dilakukan oleh kelompok musuh atau Negara yang sedang berkonflik dengan tujuan untuk mengembangkan strategi, mempengaruhi opini publik, mengatur sumber daya manusia dan material dengan cara yang dapat membantu menyelesaikan konflik mereka (Jones, 2015).

Sebuah organisasi LSM besar yang melibatkan orang India dan Pakistan untuk mencegah perang dan meningkatkan hubungan adalah *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD). PIPFPD merupakan salah satu forum yang dibentuk oleh kedua belah pihak yakni India dan Pakistan yang dianggap sebagai bentuk *Second Track Diplomacy* yang paling berhasil dalam konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Forum ini berfungsi sebagai wadah

untuk mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau sekedar mengurangi konflik yang terjadi antara kedua negara. Forum yang mulai dibentuk pada tahun 1994 ini telah menyelenggarakan delapan konvensi bersama hingga saat ini (PIPFPD, 2019)

B. Resolusi Konflik

Nicholson mengungkapkan “*conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable*”. Menurut definisi Nicholson, penyelesaian sengketa adalah adalah suatu cara untuk menciptakan proses penyelesaian atas berbagai efek dari suatu sengketa. Resolusi konflik adalah untuk proses mengurangi bahkan menyelesaikan konflik. Kriesberg mendefinisikan penyelesaian sengketa sebagai “manajemen konflik, konstruktif, dan bahkan kreatif”. Meminimalkan kekerasan akibat konflik, mengatasi permusuhan yang timbul antara pihak-pihak yang berkonflik, mencapai hasil yang bersahabat bagi pihak-pihak yang berkonflik menciptakan solusi yang terpelihara dengan baik, damai dan berkelanjutan. Weitzman mendefinisikan penyelesaian sengketa sebagai tindakan memecahkan masalah bersama-sama. Kasus lain Fisher menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang berkelanjutan antara kelompok yang terlibat. Menurut Mindes, penyelesaian sengketa adalah adalah kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan dan penting bagi perkembangan sosial dan moral yang membutuhkan keterampilan dan keahlian untuk mendorong

negosiasi, kompromi dan rasa keadilan diantara para pihak yang berkonflik.

Resolusi konflik adalah segala upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik di berbagai bidang kehidupan manusia. Seperti yang ditunjukkan Mior, penyelesaian sengketa adalah istilah luas yang berarti menangani dan menyelesaikan penyebab konflik yang mengakar. Pada intinya, penyelesaian sengketa dipandang sebagai upaya untuk mengatasi akar penyebab suatu sengketa dan menyelesaikannya dengan membangun hubungan baru yang langgeng dan positif antara kelompok atau pihak yang bermusuhan. Sementara itu, Askandar menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak, namun mekanisme pamungkasnya adalah beberapa pihak harus memberikan konsesi atau kekalahan. Metode penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Alhasil, mereka tertarik untuk memberikan solusi yang dapat diterima semua pihak yang telah mereka capai. Agar para pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian, harus dijelaskan bahwa mereka harus berpartisipasi dalam pembahasan sengketa dan lebih aktif terlibat dalam proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian. Ini memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang konflik, baik dari sudut pandang mereka atau dari sudut pandang lawan mereka. Selain itu, mereka diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang pilihan yang tersedia dan benar-benar mengevaluasi pilihan akhir yang diberikan.

Dari penjelasan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli tersebut penyelesaian sengketa dipahami sebagai suatu cara bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar. Penyelesaian konflik juga metode yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan perselisihan, memberikan para pihak yang bersengketa kesempatan untuk menyelesaikan masalah, atau mempekerjakan pihak ketiga yang bijaksana, netral dan tidak memihak. Kami mengusulkan untuk menjembatani para pihak yang bersengketa dan membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. Masalah memprioritaskan cara yang damai.

Penulis menekankan bahwa konsep *Second Track Diplomacy* merupakan konsep yang digunakan untuk melihat bagaimana peran Forum *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* (PIPFPD) sebagai salah satu aktor *Second Track Diplomacy*. PIPFPD merupakan salah satu forum yang dibentuk oleh kedua belah pihak yakni India dan Pakistan yang dianggap sebagai bentuk *Second Track Diplomacy* yang paling berhasil dalam konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau sekedar mengurangi konflik yang terjadi antara kedua negara.

Konsep lain yang digunakan oleh penulis adalah Resolusi konflik dimana *Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy* merupakan forum yang dibentuk sebagai suatu upaya untuk mempertemukan delegasi dari kedua belah pihak yang berkonflik yakni

India dan Pakistan untuk mendiskusikan perumusan strategi untuk membuka jalan bagi perdamaian dan persahabatan antara kedua negara.

Berdasarkan dari konsep-konsep tersebut, penelitian ini selanjutnya akan menjabarkan bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Forum PIPFPD dalam penyelesaian konflik India dan Pakistan melalui *Second Track Diplomacy*. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai pisau bedah dalam penelitian ini.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam memperkuat keilmiahannya, penulis menggunakan beberapa *literature review* yang terkait dengan penelitian ini. *Literature review* ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penulis. Selain itu, *literature review* ini juga digunakan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk kebaruan dalam tulisan yang diajukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan empat *literature review* yang ditulis oleh Pervaiz Iqbal Cheema, Parvin Neginraz, dkk, Muhammad Sajjad Malik, dan Aqil Shah. Adapun *literature review* yang dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

Penelitian yang pertama, yaitu *The Contribution of Track II Towards India-Pakistan Relations* yang ditulis oleh Pervaiz Iqbal Cheema pada tahun 2006. Tulisan ini membahas hubungan antara India dan Pakistan dan beragam upaya-upaya penyelesaian konflik antara kedua negara tersebut melalui *second track diplomacy*. Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah membahas

penyelesaian konflik India – Pakistan melalui *Second Track Diplomacy*. Disamping kesamaan, ada pula perbedaan dalam penelitian ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis. Dimana dalam penelitian ini membahas berbagai macam upaya *second track diplomacy* yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik India - Pakistan. Sedangkan, dalam tulisan yang diajukan oleh penulis membahas secara khusus mengenai upaya forum PIPFPD (*Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy*) sebagai *Second Track Diplomacy* dalam penyelesaian Konflik India-Pakistan.

Penelitian yang kedua, yaitu *The Role of Track Two Diplomacy in Resolving India-Pakistan Dispute : Case Study of PIPFPD* yang ditulis oleh Parvin Neginraz, dkk pada tahun 2019. Dalam penelitian ini dibahas mengenai peran dari forum PIPFPD (*Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy*) dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan. Adapun kesamaan penelitian ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah terkait dengan upaya penyelesaian konflik antara India dan Pakistan yang telah dilakukan oleh Forum PIPFPD (*Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy*) sejak tahun 1995. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya membahas mengenai upaya penyelesaian konflik India dan Pakistan oleh Forum PIPFPD melalui konvensi-konvensi yang dilakukan oleh Forum PIPFPD sejak konvensi pertama pada tahun 1995 hingga konvensi kedelapan pada tahun 2011. Sedangkan, dalam tulisan yang diajukan oleh penulis mencakup rentang waktu yang lebih lama mengenai upaya penyelesaian konflik India

dan Pakistan yang telah dilakukan oleh Forum PIPFPD yakni sejak konvensi terakhir hingga sekarang. Dalam tulisan yang diajukan oleh penulis juga terdapat bentuk upaya penyelesaian lain dari forum PIPFPD, tidak hanya konvensi-konvensi seperti yang dilakukan hingga tahun 2011 melainkan juga beragam diskusi dan *press release*.

Kemudian penelitian yang ketiga, yaitu *Track II Diplomacy and Its Impact on Pakistan – India Peace Process* yang ditulis oleh Muhammad Sajjad Ali pada tahun 2011 & 2012. Penelitian ini membahas mengenai *Track II Diplomacy* dan forum-forum yang termasuk sebagai *Track two diplomacy* dan membahas penyelesaian konflik antara India dan Pakistan. Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah membahas forum – forum *Second Track Diplomacy* yang mendiskusikan upaya penyelesaian konflik India – Pakistan, salah satu forum yang dibahas yakni forum PIPFPD, sama dengan forum yang dibahas oleh tulisan yang diajukan penulis. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan tulisan yang diajukan oleh penulis yakni penulis hanya fokus membahas satu forum saja yaitu forum PIPFPD. Berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas berbagai macam forum yang juga mengupayakan penyelesaian konflik antara India dan Pakistan.

Terakhir, penelitian yang keempat adalah *Non-official Dialogue Between India and Pakistan : Prospects and Problems* yang ditulis oleh Aqil S. Shah pada Tahun 1997. Penelitian ini membahas tentang diplomasi tidak resmi (*Non-Official Diplomacy*) yang dijalankan antara India dan Pakistan seperti *Neemrana Dialogue* dan *Summer School* serta hal utama

yang menjadi kendala dalam dialog-dialog tersebut. Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah membahas penyelesaian konflik India – Pakistan melalui *Second Track Diplomacy*. Akan tetapi berbeda dengan tulisan yang diajukan oleh penulis, dimana bentuk *Second Track Diplomacy* yang dibahas oleh penulis adalah Forum PIPFPD sedangkan dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah *Neemrana Dialogue* dan *Summer School*.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

JUDUL YANG DIAJUKAN	JUDUL / PENULIS	FOKUS PENELITIAN	PERBEDAAN FOKUS PENELITIAN
<p>Peluang dan Tantangan Forum PIPFPD (Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy)</p>	<p><i>The Contribution of Track II Towards India-Pakistan Relations</i> oleh Pervaiz Iqbal Cheema</p>	<p>Hubungan antara India dan Pakistan dan beragam upaya-upaya penyelesaian konflik antara kedua negara tersebut melalui <i>second track diplomacy</i>.</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada berbagai macam upaya <i>second track diplomacy</i> yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik India - Pakistan. Penelitian oleh penulis: fokus membahas secara khusus mengenai upaya forum PIPFPD sebagai <i>Second Track Diplomacy</i> dalam penyelesaian Konflik India-Pakistan.</p>
	<p><i>The Role of Track Two Diplomacy in Resolving India-Pakistan Dispute: Case Study of PIPFPD</i> oleh Parvin Neginraz, dkk</p>	<p>Mengenai peran dari forum PIPFPD dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan.</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada upaya penyelesaian konflik India dan Pakistan oleh Forum PIPFPD melalui konvensi-konvensi tahun 1995-2011. Penelitian oleh penulis: Selain membahas konvensi, penulis juga membahas aktivitas lain Forum PIPFPD seperti publikasi media sosial dan diskusi-diskusi.</p>
	<p><i>Track Two Diplomacy and Its Impact on Pakistan – India Peace Process</i> oleh Muhammad Sajjad Ali</p>	<p>membahas mengenai <i>Track II Diplomacy</i> dan forum-forum yang termasuk sebagai <i>Track two diplomacy</i> dan membahas penyelesaian konflik antara India dan Pakistan.</p>	<p>Penelitian terdahulu: membahas berbagai macam forum yang juga mengupayakan penyelesaian konflik antara India dan Pakistan. Penelitian oleh penulis: Fokus membahas satu forum saja yaitu forum PIPFPD.</p>
	<p><i>Non-official Dialogue Between India and Pakistan : Prospects and Problems</i> oleh Aqil S. Shah</p>	<p>Diplomasi tidak resmi (<i>Non-Official Diplomacy</i>) yang dijalankan antara India dan Pakistan seperti <i>Neemrana Dialogue</i> dan <i>Summer School</i> serta hal utama yang menjadi kendala dalam dialog-dialog tersebut.</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada penyelesaian konflik India – Pakistan melalui <i>Second Track Diplomacy</i> dalam bentuk <i>Neemrana Dialogue</i> dan <i>Summer School</i>. Penelitian oleh penulis: Fokus pada penyelesaian konflik India – Pakistan melalui <i>Second Track Diplomacy</i> dalam bentuk Forum PIPFPD.</p>

Source: Diolah dari berbagai sumber